

PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BIDANG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN LAUT PADA OPERASI MILITER SELAIN PERANG ATAU OMSP¹

Oleh : Senly Djon N. Manitik²

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.500 pulau. Diantara pulau-pulau tersebut ada yang telah terjangkau pelayanan kesehatan dan ada pula yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Belum terjangkaunya pelayanan kesehatan pada pulau-pulau tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya jumlah tenaga profesional di bidang kesehatan sangat terbatas. Untuk memenuhi hal tersebut TNI Angkatan Laut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) telah ditetapkan oleh Panglima TNI untuk memenuhi HAM Kesehatan Masyarakat di pulau-pulau kecil dengan memfungsikan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Dengan dasar tersebut penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif hasil penelitian menunjukkan salah satu tugas OMSP TNI Angkatan Laut dalam memenuhi HAM atas kesehatan masyarakat lewat Pelayanan dan dukungan Kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Sebagai Kesimpulan pemenuhan HAM atas kesehatan masyarakat merupakan salah satu tugas TNI Angkatan Laut di masa damai dengan mengimplementasikan kegiatan OMSP lewat kegiatan bhakti social kesehatan kepada masyarakat.

Kata Kunci : HAM, kesehatan, rumah sakit, angkata laut, operasi militer.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh *founding fathers* sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok

pikiran dasar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusia terjamin.³

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁴ Artinya kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menyangkut hak-hak dasar warga negara yang mutlak untuk dipenuhi. Mengingat pentingnya kesehatan, dunia internasional merumuskannya ke dalam *Millenium Development Goals*. *Millenium Development Goals* terdiri atas pencapaian pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, ketiganya merupakan indikator yang mencerminkan sejauh mana negara mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara.

Semua manusia berusaha untuk sehat, menuju sehat diperlukan suatu upaya mewujudkannya dan upaya itu kemudian disebut upaya kesehatan. Upaya kesehatan, adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Kegiatan tersebut perlu penunjangnya berupa tersedianya sarana dan prasarana, dengan ketersediaan penunjangnya maka pelayanan kesehatan akan optimal dinikmati oleh

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH., MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH., MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado

³ Dr. H. Ahmad Muliadi, SH., MH *Politik Hukum* Akademia Permata, Padang, Indonesia Tahun 2013.

⁴ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika Yogyakarta Tahun 2014.

masyarakat.⁵Himpunan perundang-undangan Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia dalam BAB II pasal 9 menyatakan :

1. Setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Setiap orang wajib menghormati, hak asasi manusia orang lain, moral, etikadan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang membutuhkan kewajiban dasar dan hak asasi. Manusia di anugrahan Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan prilaku dalam menjalani kehidupannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodratiah sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam menyelenggarakan kehidupan beermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶

Hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional, mengenai hak asasi manusia. Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang ini adalah sebab Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Pada dasarnya, manusia dianugrahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan, serta sebagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Untuk melindungi,

mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Karena manusia merupakan mahluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar.

⁷Salah satu fungsi Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan sebagai pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan tugas rumah sakit adalah memberikan kesehatan perorangan secara menyeluruh, seperti penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Rumah Sakit TNI adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan penunjang medis. Sedangkan dukungan kesehatan adalah segala upaya kesehatan yang meliputi usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan administrasi kesehatan yang ditunjukan secara langsung

⁵ Grenaldo Ginting, Tesis Judul *Hak Pasien UntukMemperoleh Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Ditinjau Dari Hak Asasi Manusa*, Manado, Tahun 2014.

⁶ Dr. Santosa Sembiring,SH., MH, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Hak Asasi Manusia*, Bandung Tahun 2006.

⁷ Cecep Triwibowo *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta 2014.

untuk mendukung peggnaan kekuatan TNI yang dilaksanakan oleh unsur TNI.⁸

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pemenuhan hak asasi manusia dalam dukungan kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut pada operasi militer selain perang atau OMSP.
2. Bagaimana penerapan sistem manajemen dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia.

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang di laksanakan dalam penelitian ini dengan menggunakan cara pendekatan yuridis impiris dan yuridis normatif, dan berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia bidang kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Kegiatan bertumpu pada konsep-konsep hukum dan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang relevan. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan bahan-bahan hukum⁹ secara teoritis yang berkaitan dengan hak asasi manusia di bidang kesehatan seperti undang-undang kesehatan dan peraturan kesehatan, seperti menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dan secara menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kementrian Pertahanan, Keputusan Panglima TNI Kep 361/V/2013 Rumah Sakit Lapangan, Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor 2/II/2006 tentang Kebijakan Strategis TNI Angkatan Laut, Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor 3/XII/2009 tentang Petunjuk Teknik Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor 2/II/2013 tentang Klasifikasi Dislokasi Fasilitas Kesehatan TNI Angkatan Laut, sedangkan dilapangan

⁸Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 361/V/2013 *tentang Buku Petunjuk Teknis Penetapan Rumah Sakit TNI Sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI.*

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jaleanta Pemula Media Group, tahun 2011 hlm. 140

penelitian langsung turun ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Wahyu Slamet bitung, yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado.

PEMBAHASAN

- A. Pemenuhan hak asasi manusia dalam dukungan kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut pada operasi militer selain perang atau OMSP.

Rumah Sakit TNI Angkatan Laut sebagai salah saatu bagian dari TNI Angkatan Laut yang diberikan kewenangan tugas pokok yaitu menyelenggarakan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Rumah sakit TNI Angkatan Laut juga memberikan peran serta dalam masyarakat sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang kegiatan operasi militer selain perang atau OMSP. Kegiatan pemenuhan hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit TNI Angkatan Laut seperti kegiatan membantu masyarakat dalam tragedi musibah bencana alam dan memberikan perhatian dalam bentuk kegiatan bhakti sosial kesehatan di pulau-pulau terluar yang sangat sulit di jangkau dengan kapal biasa.

Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr Wahyu Slamet Bitung sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut (Mabesal) yang berkedudukan langsung dibawah pembinaan Dinas Kesehatan Lantamal VIII Manado, dengan tugas melaksanakan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Salah satu penjabaran dari operasi militer selain perang atau OMSP. Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Wahyu Slamet Bitung melayani pelayanan kesehatan yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) banjir. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di beberapa tempat. Kota Manado begitu di porak porandakan oleh air arus yang cepat dan mengenagi Kota Manado. Pasca terjadi banjir bandang di Kota Manado, maka begitu banyak harta yang hilang bukan itu saja masyarakat yang mengalami kerusakan rumah tempat tinggal harus mengungsi ketempat yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Karena tempat tinggal masyarakat yang terkena hanyut oleh banjir bandang maka masyarakat di

tampung di tempat penampungan yang butuh sangat perlu sekali mendapat perhatian maka dengan kondisi masyarakat fisik menurun gejala penyakit mulai timbul dirasakan oleh masyarakat, Peran pemerintah daerah dengan meminta bantuan unsur TNI, maka Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Wahyu Slamet Bitung menyiapkan tim untuk melaksanakan bhakti sosial kesehatan dalam rangka membantu masyarakat yang mengalami sakit. Ini dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, karena masyarakat yang lemah perlu untuk mendapatkan pertolongan. Untuk melaksanakan kegiatan bhakti sosial kesehatan, tentunya Rumah Sakit TNI Angkatan Laut tidak berjalan sendiri ikut bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Sukawesi Utara, Dinas Kesehatan Kota Manado, Puskesmas-puskesmas yang berada diwilayah kota Manado saling mengisi memberikan pertolongan pelayanan kesehatan mengingat begitu banyak masyarakat yang butuh perhatian dalam pemberian pelayanan kesehatan. Dari pengalaman pada saat terjadi musibah banjir yang melanda Kota Mando beberapasaat yang lalu diketahui bahwa dalam penanganannya diperlukan koordinasi dan aksi yang cepat. Hampir semua tim kesehatan membawa dukungan kendaraan ambulace untuk membantu masyarakat yang perlu ditangani lebih lanjut dengan di rujukan ke rumah sakit rujukan pusat atau rumah sakit umum Prof. Kandouw Malalayang Manado.

Pelayanan kesehatan dilaksanakan beberapa tahap sejak bulan Januari 2014, tim kesehatan di bawah komando Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Wahyu Slamet Bitung, menyiapkan kebutuhan logistik seperti obat-obatan. Kegiatan pelayanan kesehatan sudah dibagi beberapa tempat seperti :

- a) Kelurahan kairagi samping SD/SMP Advend
- b) Kelurahan ketang baru di Mesjid Nurul Huda
- c) Lapangan olah raga perkamil
- d) Kelurahan Ranotana Lingkungan I (samping jembatan)
- e) Kelurahan Dendengan dalam (Gereja GMIM Yarden)
- f) Kelurahan Wawonasa (di Mesjid Almafirah)
- g) Kelurahan Ranotana Lingkungan I (SD Negeri 20)

- h) Kelurahan Malendeng (diMesjid A'Nur)
- i) Kelurahan Perkamil (di Mesjid Al-Taqwa)
- j) Kelurahan Wawonasa Tengan (di Mesjid Al-Ikhlas)

Pada pelaksanaan tersebut Tim Kesehatan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Wahyu Slamet Bitung berhasil melaksanakan pelayanan dukungan kesehatan terhadap masyarakat kurang lebih 3000 (tiga ribu) pasien. Rumah Sakit TNI Angkatan Laut mengikut sertakan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan perawat. Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Wahyu Slamet Bitung, ikut berperan juga dalam kegiatan Satgas Bhaksos Sosial pada Surya Baskara Jaya LX atau Sail Wakatobi Belitung. Dengan menggunakan kapal Rumah Sakit dengan nama KRI dr Soeharso-990, jenis kapal:BRS(Bantuan Rumah Sakit). Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut (Mabesal) maupun Departemen Kesehatan telah melengkapi alat-alat kesehatan secara bertahap sehingga kemampuan KRI dr. Soeharso setara dengan rumah sakit Tingkat III (tipe C). Dengan ruang perawtan pria 20 tempat tidur dan ruang perawatan wanita 20 tempat tidur. Dasar penggunaan nama KRI dr. Soeharso adalah beliau adalah Prof. Dr. Soeharso kelahiran desa kembang kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 13 Mei 1912. Beliau dokter pejuang dan dokter para pejuang. Sebagai dokter palang merah dr. Soeharso terjun kemedan juang merawat penderita yang cedera dalam perjuangan pertempuran. Para penderita itu banyak Yang sudah kehilangan kaki atau tangan, menjadi orang cacat untuk selama-lamanya. Untuk meringankan penderitaan mereka, dokter Soeharso berupaya membuat tangan dan kaki. Sesudah Indonesia merdeka dr Soeharso pun menyumbangkan tenaga untuk membantu perjuangan . Lalu pada tahun 1950 beliau berangkat ke Inggris untuk mendalami ilmu prothesa. Atas pengabdianya dr. Soeharso pun dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional melalui SK Presiden RI Nomor 086/TK/Tahun 1973 tanggal 6 Nopember 1973. Oleh karena itu nama bapak layak di abadikan di salah satu kapal perang Indonesia KRI dr. Soeharso dapat melayani kesehatan masyarakat Indonesia pada masa damai dan masyarakat pesisir,

pulau-pulau kecil terluar ulau-pulau perbadan ptasan.¹⁰

Kegiatan utama operasi bhakti sosial kesehatan Surya Baskara Jaya (SBJ) LV adalah memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi kesehatan umum, gigi dan mulut, KB, khitanan masal, operasi bedah mayor dan minor (bedah umum, plastik, urologi, obsgyn, THT, dan mata) serta penyuluhan kesehatan.¹¹Kegiatan lainnya berupa pemberian bahan kontak, karya bakti, penyuluhan hukum, bela negara serta sosialisasi pada masyarakat. Peran serta aktif Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Wahyu Slamet Bitung adalah sangat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk dilaksanakan tindakan kesehatan. Tentunya ini merupakan tugas perpanjangan tangan dari pemerintah untuk memberikan rasa nyaman dan sejahtera untuk meringankan beban masyarakat sebagai salah tugas pemenuhan hak asasi manusia.

B. Bagaimana penerapan sistem manajemen pelayanan kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa tugas rumah sakit adalah memberikan kesehatan perorangan secara menyeluruh. Sedangkan fungsi rumah sakit adalah :

- a) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh sesuai kebutuhan medis.
- c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

¹⁰Warta Kesehatan Media Komunikasi, Kordinasi dan Informasi TNI Angkatan Laut, Jakarta Tahun 2008

¹¹Warta Kesehatan Media Komunikasi Koordinasi dan Informasi TNI Angkatan Laut, Jakarta Tahun 2011.

Rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profil yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Menurut Astuti, rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta atau non pemerintah, yaitu beberapa orang (*persoon*) sepakat untuk mendirikan badan hukum (*rechtpersoon*) dan badan hukum ini melakukan kegiatan dalam bidang pendirian dalam menjalankan rumah sakit. Menurut Martafari, rumah sakit umum pemerintah adalah rumah sakit umum milik pemerintah baik pusat, daerah, departemen pertahanan dan keamanan maupun badan usaha milik negara. Rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang berlokasi di daerah propinsi, kabupaten atau kota.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal3 pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk :

- a) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b) Memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- c) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit
- d) Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

Di Indonesia telah terjadi transisi, transformasi sosial-budaya revolusi demografi, transisi epidemiologi, transisi ekonomi akibat krisis yang berkepanjangan perubahan-perubahan lain yang mencakup banyak aspek kehidupan bangsa dan dampak tersebut sangat besar terjadi pada lingkungan kesehatan. Melalui program pemerintah pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang harus semangkin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang adil

¹²Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta 2014.

dan merata kepada segenap lapisan masyarakat diseluruh wilayah Indonesia.

Salah satu unsur dalam lingkungan kesehatan adalah rumah sakit, dan rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis dan paramedia yang profesional yang teroganisir sertasarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Dengan meningkatnya tuntutan diharapkan fungsi pelayanan rumah sakit secara bertahap dan berlanjut perlu ditingkatkan agar menjadi efektif dan efisien. Hal ini memerlukan dukungan manajemen yang memadai. Demikian juga keadaan dilingkungan TNI Angkatan Laut, bila tuntutan kebutuhan dan pelayanan bagi anggota dan keluarga TNI lebih khususnya TNI Angkatan Laut tidak disertamenuntuti dengan peningkatan sumber daya manusia maka akan menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar yang padaakhirnya akan menurunkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut secara keseluruhan. Mengingat rumah sakit adalahbagian dari integral di sistem pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan secara nasional. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas maka diharapkan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dapat mandiri. Kemandiri ini menjadi semakin penting ila dihubungkan dengan upaya peningkatkan profesional serta efektifitas dalam mengantisipasi persaingan dalam eara glonalisasi. Kondiri demikian kiranya tepat jika peningkatan mutu pelayanan kesehatn melalui penerapan manajemen di Rumah Sakit agar memperoleh hasil sesuai yang diharapkan baik bagi pasien, medis dan paramedis, serta organisasi itu sendiri. Untuk mencapai hasil yang diharapkan tentunya manajemen yang baik dan profesional.

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang teroganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien (*American hospital association, 1974*).

Manajemen adalah proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (*George Terry, 1960*). Fasilitas dinas di lingkungan TNI Angkatan Laut, penggunaannya diarahkan sepenuhnya untuk mendukung satuan operasi dan satuan pendukungnya. Dalam kenyataannya, operasi senantiasa berubah disebabkan perkembangan yang terjadi, sehingga tidak dapat dihindari adanya kapasitas lebih (*idiecapacity*) fasilitas dinas yang belum digunakan secara penuh sesuai fungsinya. Untuk mendukung satuan operasi serta kebutuhan terhadap fasilitas dinas yang ada sepanjang daur hidupnya.

Selama ini pemeliharaan yang dilaksanakan masih dirasakan kurang, antara lain disebabkan keterbatasnya dukungan anggaran. Oleh karena itu dengan memanfaatkan kapasitas lebih untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional, diharapkan peran TNI Angkatan Laut dalam pemangunan nasional lebih meningkat, dan disisi lain TNI Angkatan Laut mendapat tambahan dana dari fasilitas dinas TNI Angkatan Laut terpelihara sebagaimana mestinya. Berdasarkan kebijakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut tersebut, maka perlu optimalisasi kinerja yang dapat berhasil guna dan daya guna sebagai upaya pemanfaatan fasilitas yang khususnya Rumah Sakit TNI Angkatan Laut sangat berpeluang untuk menciptakan kondisi tersebut guna mengatasi keterbatasan anggaran, yaitu dengan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan pada masyarakat sebagai suatu bentuk tindakan dalam rangkan pemenuhan hak asasi manusia. Pada kondisi yang global ini Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Wahyu Slamet Bitung, diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada prajurit, keluarga dan masyarakat dan dapat bersaing sesuai tingkat rumah sakit itu sendiri. Dengan demikian mutu dan daya saing tersebut diharapkan adanya peningkatan kinerja Rumah Sakit TNI Angkatan Laut secakeseluruhan yang ditandai dengan meningkatnya kunjungan rawat jalan dan rawat inap. Di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada prajurit, keluarga dan masyarakat dapat dilayani dengan baik tanpa

membeda-bedakan sumber pelanggan. Hal ini dapat dilaksanakan bila menerapkan prinsip-prinsip manajemen, sehingga diharapkan akan terjadi perubahan, yaitu peningkatan sumber daya manusia, sistem pelayanan kesehatan.

Rumah sakit masa kini menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama menghadapi era globalisasi, mengingat rumah sakit adalah bagian dari organisasi TNI Angkatan Laut yang terkait dengan aturan yang digariskan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut. Dalam situasi global yang berubah secara cepat, maka untuk tetap dapat menjaga eksistensinya perlu mengidentifikasi masalah secara tepat, yaitu dengan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Hasil analisa yang kemudian dilaksanakan pemetaan strategi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, maka perlu diterapkan manajemen modern dalam rangka menciptakan pelayanan yang lebih baik. Masalah dan tantangan utama Rumah Sakit TNI Angkatan Laut saat ini adalah bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan institusional yang diterapkan. Dengan mempertimbangkan perubahan globalisasi dimana Rumah Sakit TNI Angkatan Laut mulai berorientasi kepada sosial ekonomi maka penerapan manajemen modern harus dijadikan komitmen bagi pengelola Rumah Sakit TNI Angkatan Laut untuk dapat meningkatkan pelayanannya.

Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia yang harus di prioritaskan adalah :

- a) Fokus dan tujuan akhir adalah memberikan kepuasan pada pasien.
- b) Pengembangan dan pengendalian dicapai dengan upaya berlanjut untuk meningkatkan mutu, dan secara terus menerus menyempurnakan proses-proses di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut.
- c) Penerapan sistem manajemen pelayanan dengan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan setiap personil dan satuan kerja di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut.
- d) Menerapkan strategi dan teknik-teknik yang terbukti efektif guna meningkatkan mutu pelayanan pasien.

¹³Penerapan sistem Manajemen dalam pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan karena merupakan perpaduan semua fungsi dalam organisasi yang dibangun berdasarkan kualitas, team work produktifitas dan kepuasan pasien. Hal ini ditujukan dengan sikap masyarakat terhadap tuntutan pelayanan yang diberikan semangkin kritis. Melalui penerapan sistem manajemen pelayanan kesehatan akan dapat menghasilkan kualitas yang lebih terbaik dengan cara yang ditempuh adalah melakukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses dan lingkungannya guna memperoleh suatu kebutuhan dan keinginan pelanggan secara baik. Dalam sistem kualitas modern pada pelanggan, maka perlu keunggulan pelayanan yang secara komprehensif untuk melaksanakan dengan baik. Partisipasi aktif dari pemimpin, agar setiap personel bertanggung jawab dan turut meningkatkan fungsi tugasnya masing-masing. Dimana sikap mental dasar ini sangat berguna dan mendasari cara berpikir dan bertindak dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sehari-hari. Dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut mutlak melaksanakan suatu pekerjaan secara berkesinambungan melalui proses perencanaan pelaksanaan pekerjaan, mengevaluasi dan menindak lanjuti demi tercapainya strategi dan misi yang telah dicanangkan. Proses ini merupakan perputaran siklus manajemen yang dilakukan sampai tercapainya standar kinerja dengan tujuan agar selalu dapat meningkatkan kinerja yang telah dilaksanakan. Personel Rumah Sakit TNI Angkatan Laut harus memiliki suatu tim yang baik yang mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibanding dengan hanya mengandalkan salah satu bagian saja. Dengan personel yang memiliki karakter dan selalu berkompetensi serta saling bekerjasama, merupakan modal utama untuk memperoleh suatu proses kerja yang produktif menuju kepentingan yang lebih baik. Walau Rumah Sakit TNI Angkatan Laut merupakan organisasi militer yang sarat dengan hirarki hendaknya

¹³Senly Manitik, *Karya tulis militer judul Optimalisasi Penerapan Sistem Manajemen Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit TNI AL dr. Wahyu Slamet Bitung terhadap prajurit, keluarga dan masyarakat*, Surabaya, 2008.

dalam profesi kesehatan tetap terjalin secara sinergis. Untuk itu dalam membangun kerjasama yang unggul. Seluruh personel Rumah Sakit TNI Angkatan Laut hendaknya memiliki kematangan yang tinggi, karakter yang baik maupun wawasan, agar memiliki kesamaan ucapan dengan perbuatan yang tercermin dengan baik. Mempunyai kestabilan dalam sikap hidup yang berdasarkan pada prinsip dan sistem nilai, bukan pada keadaan lingkungan yang terarah. Mengingat pelayanan kesehatan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, meskipun performennya baik namun karakter kurang baik, tidak akan memiliki arti apa-apa dan ini harus disingkirkan dari organisasi. Mengingat Rumah Sakit TNI Angkatan Laut adalah organisasi yang bersifat sosio-ekonomi, maka kesalahan sekecil apapun akan berdampak sangat luas. Untuk itu kematangan individu hendaknya dibangun pada setiap personel secara terus menerus agar memperoleh pelanggan yang loyal atau pelanggan memberikan pelayanan yang memuaskan.

Mutu dapat dilaksanakan dengan adanya komitmen bersama dan difokuskan pada pasien yaitu :

- a) Menghormati pasien, memberikan waktu pelayanan
- b) Cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan.
- c) Konsisten terhadap pelayanan yang diberikan
- d) Pasien merasa ada jaminan rasa aman dan nyaman.
- e) Diwujudkan secara nyata, meskipun jasa sulit diukur secara kualitatif namun dapat ditempatkan dengan penampilan.
- f) Pemimpin harus berinisiatif dan berani melakukan perubahan menuju perbaikan.

PENUTUP

Salah satu tugas TNI di masa damai yaitu melaksanakan operasi militer selain perang atau OMSP, hal ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hamkamneg yang dijelaskan dalam pasal 10 ayat (3) bahwa TNI bertugas untuk menyelenggarakan kebijakan pertahanan negara di antaranya adalah menyelenggarakan operasi militer selain perang atau OMSP, salah

satu implementasinya dalam bentuk kegiatan bhakti sosial untuk masyarakat.

Personel kesehatan TNI adalah ujung tombak Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas dukungan kesehatan dan pelayan kesehatan. Sebab di era globalisasi yang ditandai dengan persaingan bisnis yang kompetitif telah terjadi perubahan paradigma baru dalam pengelolaan manajemen rumah sakit di mana profesionalisme merupakan syarat utama untuk dapat memberikan kepuasan kepada pasien di dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta 2014
- Dr. Santosa Sembiring, SH., MH, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Hak Asasi Manusia*, Bandung Tahun 2006.
- Dr, H, Ahmad Muladi, SH., MH, *Politik Hukum Akademia Permata Padang Tagun* 2013
- Geraldo Ginting, Tesis Judul *Hak Pasien Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di Tinjau dari Hak Asasi Manusia*, Tahun 2014.
- Keputusan Panglima TNI tentang *Buku Petunjuk Teknis Rumah Sakit TNI Sebagai Rumah Sakit Sandaran Operasi TNI*. Tahun 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Jaleanta Pemula Media Group Tahun* 2011, hlm. 140
- Senly manitik, Karya tulis militer, *Optimalisasi Penerapan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit TNI AL dr. Wahyu Slamet Bitung terhadap Prajurit, Keluarga, dan Masyarakat*. Surabaya, Tahun 2008.
- Warta Kesehatan Media Komunikasi dan Informati TNI Angkatan Laut*, Jakarta Tahun 2011.
- Warta Kesehatan Media Komunikasi dan Informati TNI Angkatan Laut*, Jakarta Tahun 2008
- Warta Kesehatan Media Komunikasi dan Informati TNI Angkatan Laut Peran Personel Kesehatan Pada Komando Tugas Gabungan Pendaratan Administrasi (Kogasgabatmin)*, Jakarta Tahun 2014